

PERAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA GOA KREO DI KOTA SEMARANG

Rahmania Rifka Salsabela, R. Slamet Santoso, Ari Subowo

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof.H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Semarang City has become a destination for tourist both domestically and internationally. The establishment of tourist attractions aims to empower the community, encouraging active participation to raise awareness of the tourism potential at each of these attractions. However, the development of the tourist attraction, Goa Kreo, has not yet reached its development. In this research, the researcher utilizes a descriptive qualitative research method. The actor involved in the development of Goa Kreo include the Department of Culture and Tourism (Disbudpar) of Semarang City, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Semarang City, the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of Goa Kreo, the Department of Planning and Development (DPU) of Semarang City, Kandri Sub – district, Sukomakmur Tourism Awareness Group (Pokdarwis), the local community of Kandri, and tourists visiting Goa Kreo. The conclusion of this research is that there is still suboptimal collaboration among actor hindering the development of Goa Kreo. Therefore, the researcher recommends improving the relationships among actor and enhancing communication to ensure the efficient development of Goa Kreo as a tourist attraction.

Keywords : Actor, Role of Actor, Tourism Attraction Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk diperluas dan ditingkatkan sebagai bagian dari sektor industri. Menurut Bernecker (dalam Cahyadi, 2020: 1) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan himpunan dari semua fenomena, terutama ekonomi yang dihasilkan oleh kedatangan, tinggal dan

keberangkatan wisatawan ke lingkungan masyarakat, provinsi atau negara tertentu. Pariwisata sendiri dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda karena hubungannya pun sangat terkait dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, bahkan statistik.

Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam jenis objek wisata yang terdapat di berbagai daerahnya. Dalam hal pengembangan pariwisatanya sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Pemerintah Jawa Tengah menggunakan Gerakan Bersama yaitu melibatkan para aktor yang tercermin dalam matriks rencana aksi baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Tujuan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewujudkan kebijakan tersebut yaitu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di Jawa Tengah. Adapun tujuan lain dari kebijakan tersebut, yaitu mengembangkan pariwisata Provinsi Jawa Tengah saat ini dengan memperhatikan ekonomi kreatif dan industri.

Tabel Data Wisatawan Kota Semarang Tahun 2020 – 2022

| Tahun | Wisawatan Mancanegara | Wisatawan Domestik |
|-------|-----------------------|--------------------|
| 2020 | 6.628 | 3.260.303 |
| 2021 | 77 | 2.670.281 |
| 2022 | 4.918 | 5.338.233 |

Sumber : Telah diolah kembali dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah, 2022

Kota Semarang merupakan kota yang dikenal memiliki banyak potensi

wisata dan dikenal sebagai kota dagang. Namun, kini Kota Semarang telah berubah menjadi kota wisata. Kota Semarang adalah salah satu tujuan wisata yang sangat populer dikunjungi oleh wisatawan domestik, tetapi tidak bagi wisatawan mancanegara. Dapat dilihat pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya penurunan wisatawan domestik Kota Semarang di tahun 2021, tetapi meningkat kembali secara drastis kunjungan wisatawan domestik di tahun 2022. Melihat dari data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa tujuan dari wisata Kota Semarang sendiri yaitu untuk mengedepankan alam, budaya, dan keunikan suatu tempat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata lokal.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 berupaya dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Semarang. Potensi pariwisata di Kota Semarang perlu dipelajari secara cermat untuk pengembangan ke depan. Sumber daya yang ada di Kota Semarang bisa dijadikan produk wisata menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara setelah diolah. Posisi geografis Kota Semarang dianggap strategis karena terletak di jalur perlintasan utama di Pulau Jawa. Oleh karena itu, kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mempromosikan objek wisata

Kota Semarang. Salah satu tempat wisata di Kota Semarang yang dapat dianalisis ada Goa Kreo.

Pengembangan objek wisata Goa Kreo tidak terlepas dari adanya peran aktor yang saling bahu membahu dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Para aktor berperan penting dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo, segala bentuk koordinasi para aktor berkaitan langsung dengan optimal atau tidaknya pengembangan objek wisata tersebut. Pengembangan objek wisata Goa Kreo saat ini sudah melibatkan peran dari para aktor meskipun terbilang belum cukup optimal. Adapun aktor yang terlibat adalah instansi pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk pengelola objek wisata Goa Kreo yaitu UPTD dilingkungan Pemda Kota Semarang.

Peran aktor dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo merupakan salah satu dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan objek wisata. Akan tetapi, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para aktor. Goa Kreo, yang memiliki keindahan dan menawarkan pengalaman wisata yang menarik melalui keberadaan fauna monyet ekor panjang. Namun, kurangnya keselarasan antara potensi objek wisata dan minimnya perhatian dari Pemerintah Kota Semarang telah menghasilkan sejumlah hambatan dalam usaha untuk

mengoptimalkan daya tarik dan kualitas wisata di wilayah tersebut. Kendala – kendala tersebut melibatkan alokasi anggaran yang tidak memadai, kebijakan pembangunan yang belum terfokus, dan kurangnya dukungan untuk pemeliharaan infrastruktur dan keamanan wisata, semuanya menjadi faktor yang merugikan dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pengembangan Objek wisata Goa Kreo, peneliti tertarik untuk menganalisa siapa saja aktor yang mempunyai kepentingan dalam pengembangan Objek wisata Goa Kreo dan bagaimana peran dari setiap aktor terkait. Selain itu, peneliti ingin menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat peran serta aktor dalam pengembangan Objek wisata Goa Kreo. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Aktor dalam Pengembangan Objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Siapa saja aktor dan bagaimana peran aktor dalam pengembangan Objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat aktor dalam pengembangan Objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang?

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi aktor dan menganalisis peran aktor dalam pengembangan Objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat aktor dalam pengembangan Objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang.

B. Kerangka Teori

Identifikasi Aktor

Klasifikasi dari aktor atau *stakeholders* sendiri menurut Maryono (dalam Soslissa, 2021) mengklasifikasikan identifikasi aktor menjadi tiga, yaitu :

1. Aktor primer merupakan mereka yang secara langsung terlibat dan berpengaruh besar dalam suatu kebijakan, proyek, atau inisiatif tertentu.
2. Aktor sekunder merupakan merupakan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan tidak langsung atau tidak sekuat aktor primer dalam suatu proyek, kebijakan, atau inisiatif tertentu.
3. Aktor kunci merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh, kepentingan, atau kekuasaan yang signifikan terhadap suatu proyek, kebijakan, atau inisiatif tertentu.

Peran Aktor

Nugroho (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020) menjelaskan bahwa pada saat menganalisis 37 peran aktor dalam implementasi suatu kebijakan, dapat dikelompokkan menjadi lima indikator, yaitu :

1. *Policy creator* adalah individu atau sekelompok individu yang memegang tanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan kebijakan di dalam suatu organisasi, instansi pemerintah, atau entitas terkait.
2. Koordinator adalah posisi dalam suatu kelompok yang memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kerja sama yang efektif serta komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.
3. Fasilitator adalah individu atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mempermudah atau memfasilitasi proses dalam kelompok atau pertemuan dengan tujuan mencapai suatu tujuan bersama.
4. Implementer adalah individu, sekelompok orang, atau entitas yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kebijakan, program, atau proyek.
5. Akselerator adalah suatu alat atau sistem yang dipergunakan untuk mempercepat atau meningkatkan

kecepatan atau kinerja suatu objek atau proses.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Komponen terhadap faktor pendorong dan penghambat peran aktor dalam pengembangan pariwisata, antara lain (Destiana, Rizka: 2020) :

- 1) Faktor Pendorong
 - a. Nilai adalah keuntungan atau kepentingan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat atau terkait dengan suatu organisasi, proyek, atau entitas tertentu.
 - b. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara individu, kelompok, atau entitas dengan menggunakan metode seperti kata – kata, suara, gambar, tulisan, atau gestur.
- 2) Faktor Penghambat
 - a. Kepercayaan adalah istilah kompleks yang mencakup keyakinan, pandangan, dan sikap individu terhadap orang lain atau situasi tertentu karena memiliki nilai moral dan etika yang positif dan dianggap baik.
 - b. Kebijakan adalah seperangkat tindakan, aturan, atau petunjuk yang disusun untuk memberikan panduan dan arahan dalam

mengatur suatu tindakan atau pengambilan keputusan di dalam suatu entitas.

Pengembangan Pariwisata

Menurut Buhalis (dalam Berutu. F, 2023) menjelaskan bahwa komponen dari suatu pengembangan pariwisata dikategorikan menjadi 6A, yaitu :

1. *Attraction* (Atraksi), merujuk pada elemen atau daya tarik yang menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi atau tujuan wisata tertentu.
2. *Accessibilities* (Akses), merujuk pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi dan fasilitas yang memungkinkan wisatawan untuk mencapai dan mengakses destinasi pariwisata dengan mudah.
3. *Amenities* (Fasilitas Pendukung), merujuk pada infrastruktur, layanan, dan fasilitas yang mendukung pengalaman wisatawan dan memastikan keberhasilan destinasi pariwisata.
4. *Accommodation* (Akomodasi), merujuk pada fasilitas yang menyediakan tempat tinggal dan penginapan bagi wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi pariwisata.
5. *Activities* (Aktivitas), melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik,

pengalaman, dan keberlanjutan destinasi pariwisata.

6. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung), mencakup berbagai aspek yang mendukung pengalaman wisatawan dan keberlanjutan destinasi pariwisata.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokus atau wilayah yang dipilih oleh peneliti adalah Objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang. Fokus penelitian dalam hal ini adalah mengenai peran aktor dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang. Subjek penelitian, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo, Kelurahan Kandri, Masyarakat, dan Wisatawan. Metode snowball sampling digunakan untuk memahami peran aktor dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang.

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat tiga alur kegiatan Analisa, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau

penyimpulan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu sebuah metode untuk mencari keakuratan informasi melalui wawancara dengan berbagai informan, guna memperoleh informasi yang lebih tepat karena berasal dari berbagai sudut pandang dan pendapat yang berbeda. Kemudian, data yang telah dikumpulkan diverifikasi kebenarannya dengan menganalisis hasil wawancara yang sesuai dengan situasi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Aktor

Dalam merumuskan, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan, kinerja para aktor yang terlibat merupakan suatu hal yang penting. Keberhasilan kebijakan bertanggung jawab bergantung pada keterlibatan profesional dan tanggung jawab dari para pihak terkait agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

1. Aktor Kunci

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang

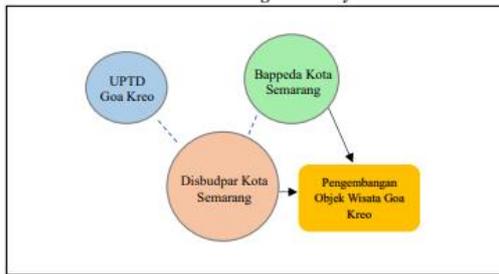
Disbudpar Kota Semarang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan dan strategi untuk pengembangan objek wisata Goa Kreo.

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang mempunyai tanggung jawab dalam menetapkan rencana strategis Pembangunan wilayah yang mencakup pengembangan objek wisata.
2. Aktor Primer
- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pengkajian yang menjadi dasar kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.
3. Aktor Sekunder
- a. Kelurahan Kandri
Kelurahan Kandri berperan memberikan dukungan dalam mempromosikan secara lokal, mengajak partisipasi masyarakat Kandri, dan menyediakan informasi mengenai objek wisata Goa Kreo kepada pengunjung.
- b. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang memiliki peran dalam pemeliharaan, perbaikan, serta pengembangan infrastruktur di Goa Kreo.
- c. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sukomakmur
Peran Pokdariws ini terletak pada upaya membangun kesadaran dan rasa yang erat antara Pokdariws, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat memajukan pengembangan objek wisata Goa Kreo dengan berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.
- d. Masyarakat
Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai peran, dari menyediakan layanan atau produk dalam industri pariwisata lokal hingga mendukung promosi dan pelestarian objek wisata Goa Kreo
- e. Wisatawan
Kehadiran wisatawan di Goa Kreo memiliki peran penting dalam mendukung finansial melalui kunjungan, memberikan umpan balik, serta mempengaruhi popularitas serta citra objek wisata Goa Kreo melalui pengalaman wisata mereka.

B. Peran Aktor

1. Policy Creator

Gambar Diagram Policy Creator



Sumber : Peneliti

Hubungan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang terletak pada peran mereka sebagai perancang kebijakan yang menghasilkan dan merancang Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 317/HK/KPTS/202 tentang Penetapan Objek Wisata Daya Tarik Wisata Kota Semarang. Kolaborasi antara Disbudpar Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang tersebut perlu menghasilkan kesepakatan dan kerjasama secara bersama – sama.

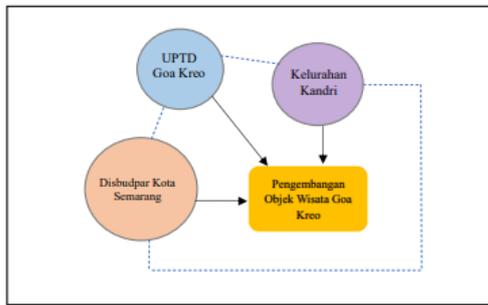
Menurut Ansel (2007) dalam (Matthori et al., 2021), hal ini membutuhkan kesamaan visi, misi, landasan, tujuan, ideologi, arahan, dan strategi yang jelas. Dalam konteks spesifiknya, Bappeda Kota Semarang dan Disbudpar Kota Semarang memiliki fokus yang berbeda tetapi berkaitan erat dalam pembentukan Goa Kreo sebagai objek wisata di Kota

Semarang. Bappeda Kota Semarang bertanggung jawab atas perencanaan Pembangunan umum di suatu wilayah, mengkoordinasikan program – program pembangunan, dan mengatur penggunaan lahan serta sumber daya. Di sisi lain, Disbudpar Kota Semarang lebih terfokus pada pengembangan kebudayaan dan pariwisata dan mengidentifikasi potensi wisata.

Pada dasarnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo mempunyai peran utama terkait keterlibatannya dalam implementasi dan operasionalisasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Semarang dan Disbudpar Kota Semarang. Namun dalam hal ini, UPTD Goa Kreo turut andil dalam proses penyusunan kebijakan terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015 – 2025 bersama dengan Bappeda Kota Semarang, dan Disbudpar Kota Semarang. Hal ini untuk mengatur bagian – bagian objek wisata yang ada di Kota Semarang, pembangunan semua objek wisata di Kota Semarang disesuaikan dengan tema masing – masing dan mengacu pada Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015.

2. Koordinator

Gambar Diagram Koordinator



Sumber : Peneliti

Menurut Ervianti (2018), mengungkapkan bahwa koordinasi adalah suatu kegiatan dimana terjadi interaksi antara ebrbagai pihak dengan tujuan untuk saling berbagi informasi dan mencapai Keputusan yang diinginkan sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam hal ini, koordinasi antara Disbudpar Kota Semarang dan UPTD Goa Kreo dikatakan belum optimal. Hal ini karena dalam proses pengembangan objek wisata Goa Kreo, pihak Disbudpar Kota Semarang tidak melakukan kegiatan rapat rutin yang bertujuan untuk mendapatkan kritik, saran, atau aspirasi dari pihak UPTD Goa Kreo. Pihak Disbudpar Kota Semarang hanya melakukan rapat dengan UPTD Goa Kreo apabila terdapat event atau kegiatan hari – hari besar tertentu saja.

Pengembangan objek wisata Goa kreo sendiri juga tidak terlepas dari adanya koordinasi pihak UPTD Goa Kreo dan Disbudpar dengan Kelurahan Kandri. Koordinasi Kelurahan Kandri

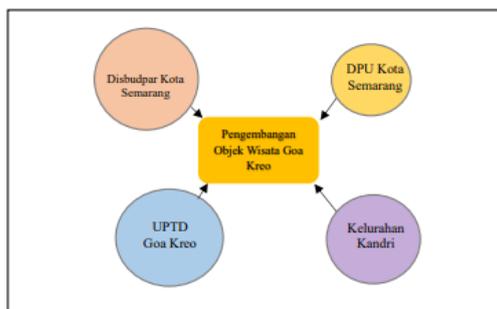
dengan pihak Disbudpar Kota Semarang sendiri dikatakan belum optimal. Disbudpar Kota Semarang dalam mengadakan kegiatan di objek wisata Goa Kreo sering tidak melibatkan peran masyarakat Kandri, seperti pada kegiatan Sesaji Rewondo. Kegiatan tradisi ini sepenuhnya dikelola oleh pihak Disbudpar Kota Semarang dan dibantu oleh pihak UPTD Goa Kreo. Namun, dalam keberlangsungan kegiatan tersebut Disbudpar Kota Semarang tidak melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Kandri untuk menggandeng peran masyarakat sebagai masyarakat lokal maupun pokdarwis untuk turut dalam kegiatan tersebut. Disbudpar Kota Semarang justru menggandeng event organizer untuk mengelola kegiatan Sesaji Rewondo, tentu hal ini menjadi konflik tersendiri antara Kelurahan Kandri dan masyarakat Kandri dengan pihak Disbudpar Kota Semarang.

Menurut Nuryanti dan Hwang (2002) dalam (Salouw, 2021), sektor swasta yang cenderung fleksibel dan tidak terikat oleh kepentingan politik formal, memiliki keunggulan dalam sumber daya finansial dan kebutuhan pengembangan sendiri dalam konteks pariwisata. Oleh karena itu, dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo,

diperlukan peran aktif dari sektor swasta melalui koordinasi untuk mendukung pengembangan objek wisata Goa Kreo. Namun, hingga saat ini objek wisata Goa Kreo belum adanya keterlibatan pihak swasta untuk menunjang pengembangan objek wisata.

3. Fasilitator

Gambar Diagram Fasilitator



Sumber : Peneliti

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang memiliki kapasitas untuk menjadi pengarah utama dalam merancang strategi pengembangan objek wisata Goa Kreo. Bentuk fasilitas yang diberikan dari Disbudpar Kota Semarang adalah mengadakan kegiatan rutin sharing session dan fokus group discussion (FGD) dengan seluruh pengelola objek wisata Kota Semarang di setiap tahun. Kegiatan FGD dan sharing session ini diselenggarakan oleh pihak Disbudpar Kota Semarang sebagai wadah para pengelola untuk terus meningkatkan pengembangan objek wisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang juga

memberikan fasilitas kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dengan memberikan pelatihan dan pembinaan, seperti pelatihan homestay, pemandu wisata, dan juga pelatihan pembuatan sajian kuliner.

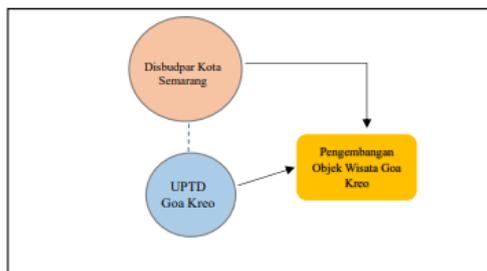
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang sebagai aktor pendukung memiliki peran krusial dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo. Bentuk peran fasilitator dari DPU Kota Semarang, yaitu berkaitan dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, ketersediaan akses, dan fasilitas umum di sekitar objek wisata Goa Kreo. DPU Kota Semarang mengkoordinasikan proses Pembangunan atau peningkatan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung aktivitas pariwisata dan kenyamanan para pengunjung.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo yang merupakan pengelola objek wisata Goa Kreo juga turut menjadi peran fasilitator dalam pengembangan objek wisata Goa kre. Bentuk fasilitas yang diberikan dari pihak UPTD Goa kre adalah mengutamakan masyarakat Kandri untuk menjadi tenaga kerja di objek wisata Goa Kreo. Selain itu, pihak UPTD Goa Kreo memprioritaskan masyarakat Kandri untuk dapat berjualan di sekitar Goa Kreo.

Kelurahan Kandri sendiri memfasilitasi diskusi atau konsultasi dengan masyarakat setempat untuk memahami harapan, kebutuhan, serta masukan dari perspektif komunitas sekitar Goa Kreo. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan serta memastikan kelangsungan kebijakan yang diusulkan. Kelurahan Kandri mengorganisir forum diskusi tersebut melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

4. Implementor

Gambar Diagram Implementor



Sumber : Peneliti

UPTD Goa Kreo bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang untuk memastikan bahwa pengembangan objek wisata sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. UPTD Goa Kreo selalu mengikuti forum, seperti pelatihan atau diskusi yang diselenggarakan oleh pihak Disbudpar Kota Semarang. Namun, peran implementer UPTD Goa Kreo dalam melakukan pemasaran dan

promosi untuk meningkatkan daya tarik objek wisata dikatakan belum optimal. Hal yang menjadi dasarnya kurangnya promosi di objek wisata Goa Kreo adalah minimnya tenaga kerja yang bekerja di objek wisata Goa Kreo dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang paham terkait teknologi.

Ketidakkampuan untuk terus berinovasi atau melakukan pembaruan dalam strategi pemasaran objek wisata Goa Kreo dapat mengurangi daya tarik bagi wisatawan. Dalam hal ini, UPTD Goa Kreo masih tidak memahami terhadap kebutuhan dan preferensi pasar sasaran yang dapat mengakibatkan strategi pemasaran yang tidak cocok dengan ekspektasi atau minat potensial wisatawan.

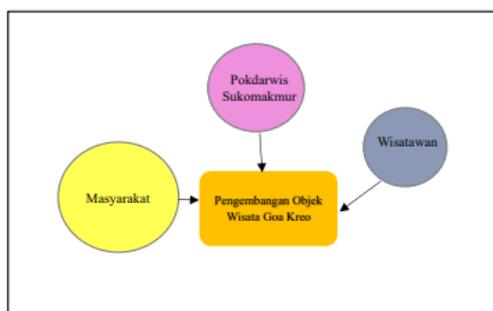
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang dalam memainkan peran sentral sebagai implementer pengembangan objek wisata Goa Kreo. Disbudpar Kota Semarang memiliki tanggung jawab krusial dalam perencanaan dan pengelolaan berbagai aspek yang terkait dengan objek wisata. Dari perumusan rencana strategis hingga pengaawasan langsung terhadap Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Disbudpar Kota Semarang selalu mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan

pariwisata yang ada di selain Kota Semarang. Dengan keterlibatan Disbudpar dalam kegiatan yang berkaitan pengembangan objek wisata, sebagai bentuk pembanding dan sebagai referensi dalam pengembangan objek wisata di Kota Semarang.

Disbudpar Kota Semarang juma memiliki peran aktif dalam meningkatkan daya tarik wisata Goa Kreo melalui promosi dan pemasaran yang efektif. Disbudpar Kota Semarang bekerja sama dengan berbagai pihak dan komunitas setempat, guna menciptakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Dengan mengambil peran inisiatif ini, Disbudpar Kota Semarang tidak hanya menciptakan pengalaman wisata yang unik di Goa Kreo, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal serta pelestarian nilai – nilai budaya yang terkandung di dalamnya

5. Akselerator

Gambar Diagram Akselerator



Sumber : Peneliti

Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Sukomakmur dalam hal ini terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan program – program yang mendukung perkembangan objek wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang. Pokdarwis Sukomakmur mengatur segala bentuk kegiatan yang meningkatkan daya Tarik wisata. Sebagai implementer, Pokdarwis Sukomakmur menginisiasi program pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Hal ini termasuk pelatihan, pembinaan, dan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat Kandri. Namun, Pokdarwis Sukomakmur sebagai implementer masih dikatakan belum optimal dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo.

Pada kegiatan pelatihan atau focus group discussion Pokdarwis se Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Disbudpar Kota Semarang, terlihat hanya beberapa orang saja yang aktif. Ditemukannya juga adanya pertentangan antar anggota Pokdarwis Sukomakmur yang menyebabkan kurangnya tekad dan kesepahaman antar anggota. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keseriusan atau motivasi dalam diri sumber daya manusia pada Pokdarwis Sukomakmur dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo.

Peran masyarakat dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo tidak hanya sebagai pengguna saja, melainkan juga sebagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan dan pemeliharaan objek wisata. Keterlibatan aktif dan kontribusi positif masyarakat menjadi motor utama dalam pertumbuhan dan kesuksesan objek wisata. Peran mereka dalam menjaga, mempromosikan, serta meningkatkan pengalaman wisatawan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan dan kelangsungan objek wisata. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat Kandri di sekitar Goa Kreo adalah berperan sebagai tenaga kerja dan sebagai pedagang di objek wisata Goa Kreo.

Kunjungan wisatawan secara langsung juga memberikan kontribusi pada perekonomian lokal dengan menjadi pendukung utama bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sekitar objek wisata. Pengalaman positif yang dialami oleh wisatawan di objek wisata Goa Kreo bisa menjadi sumber testimoni yang berharga. Ulasan, rekomendasi, atau memposting di platform media sosial tentang pengalaman mereka, memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan lainnya untuk mengunjungi objek wisata Goa Kreo.

C. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

a. Nilai

Nilai individual menekankan pada integritas, Kerjasama tim, dan dedikasi memegang peranan krusial dalam manajemen objek wisata Goa Kreo. Nilai organisasi menekankan pada kerjasama antar aktor menunjukkan keseriusan dan komitmen terhadap nilai – nilai organisasi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kandri.

Nilai legalitas sebagai dasar hukum yang kokoh, objek wisata Goa Kreo tidak hanya memberikan rasa aman bagi pengunjung, melainkan juga membentuk fondasi yang stabil untuk perkembangan berkelanjutan. Nilai profesionalitas mencakup kualitas sikap seorang anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai standar yang berlaku.

b. Kebijakan

Kebijakan sangat vital dalam semua aspek pengembangan dan pengelolaan objek wisata Goa Kreo. Keberhasilan proses pengembangan pariwisata ini sangat bergantung pada landasan yang dibentuk oleh undang – undang dan Surat Keputusan (SK) yang berlaku. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo, menegaskan bahwa kebijakan bukan hanya berfungsi

sebagai panduan strategis tetapi juga sebagai dasar untuk mengarahkan perkembangan objek wisata Goa Kreo. Pentingnya peran kebijakan juga ditekankan oleh Lurah Kelurahan Kandri, yang mencatat bahwa tanpa kebijakan yang kuat, potensi konflik dengan masyarakat setempat atau pihak lain dapat muncul.

c. Potensi yang melimpah

Potensi yang berlimpah menjadi dorongan bagi para aktor yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo. potensi pariwisata memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak dalam perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan potensi yang menjanjikan di objek wisata Goa Kreo menjadi kekuatan utama, karena melalui pemanfaatan beragam potensi tersebut, banyak kegiatan yang dapat dijalankan untuk mendorong perkembangan objek wisata di masa depan.

2. Faktor Penghambat

a. Komunikasi

Komunikasi antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang mengalami hambatan. Kepala UPTD Goa Kreo, menyatakan bahwa

komunikasi mengalami ketidakefektifan yang tercermin dari tidak adanya rapat rutin dan keterbatasan berkomunikasi, seperti pesan WhatsApp atau percakapan terbatas saat acara tertentu. Di sisi lain, Lurah Kelurahan Kandri, mencatat adanya kendala serupa dalam interaksi dengan Disbudpar Kota Semarang, dimana hubungan berkomunikasi terbatas pada pelatihan tanpa adanya komunikasi lebih lanjut.

b. Kepercayaan

Kelurahan Kandri yang mencerminkan ketidakpercayaan terhadap Disbudpar Kota Semarang, dengan menyatakan bahwa masyarakat merasa kurang terlibat dalam perencanaan agenda terkait Goa Kreo. Ketidakpercayaan juga tercermin dalam hubungan antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang terhadap laporan kebutuhan dan kendala yang disampaikan oleh UPTD Goa Kreo menunjukkan bahwa masalah ini memiliki dampak yang lebih luas. Lurah Kelurahan Kandri pun menegaskan bahwa pelatihan yang diberikan dari Disbudpar Kota Semarang akan sia – sia tanpa kepercayaan masyarakat.

c. Kurangnya partisipasi anggota pokdarwis

Kurang optimalnya partisipasi dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sukomakmur karena kurangnya pemahaman mengenai keuntungan dari Kerjasama, hambatan sumber daya manusia, dan rendahnya tingkat kesadaran. Hal ini pun sesuai pernyataaninforman melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Lurah Kelurahan Kandri, dan masyarakat pedagang objek wisata Goa Kreo.

Ketidakoptimalan partisipasi Pokdarwis Sukomakmur didasari oleh kurangnya dorongan atau inisiatif. Pokdarwis Sukomakmur tidak hanya terbatas pada konteks bisnis masyarakat pedagang Goa Kreo saja, melainkan juga pada Upaya yang lebih luas untuk memajukan objek wisata Goa Kreo. Tantangan utama dalam meningkatkan optimalisasi partisipasi Pokdarwis ini melibatkan kurangnya pemahaman akan manfaat kerjasama, hambatan sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran.

Dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang terdapat lima peran, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

Adapun faktor pendorong dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang adalah nilai, kebijakan, dan potensi yang melimpah. Nilai individu yang meliputi kepemimpinan efektif, kerjasama tim, dan dedikasi menjadi elemen kunci. Nilai organisasi menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, sementara nilai legalitas memberikan landasan hukum yang solid. Profesionalisme menjadi fondasi untuk menjamin pengalaman yang unggul bagi pengunjung. Sedangkan, peran kebijakan sendiri sangat penting sebagai panduan strategis dan dasar untuk pengembangan objek wisata Goa Kreo.

Faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo adalah komunikasi, kepercayaan, dan kurangnya partisipasi anggota pokdarwis. Kurangnya komunikasi yang efektif antara aktor, terutama antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo, Kelurahan Kandri, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang. Kurangnya perkembangan kepercayaan antar pihak juga menjadi permasalahan yang sedang dihadapi dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo.

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tentang peran pihak berwenang dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo di Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Perlunya menyusun mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih efisien antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Goa Kreo.
2. Diperlukan usaha insentif dalam komunikasi dan keterlibatan langsung dengan Kelurahan Kandri serta masyarakat setempat.
3. Pentingnya melakukan presentasi data dan mengungkap manfaat potensial, termasuk dampak ekonomi dan sosial secara lebih persuasif kepada pihak terkait.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Goa Kreo perlu meningkatkan strategi pemasaran dengan memanfaatkan berbagai platform, termasuk media sosial, website, dan menjalin kerja sama dengan agen perjalanan lokal.
5. Perlunya menyelenggarakan program pelatihan dan penyuluhan yang ditujukan kepada anggota Pokdarwis untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai manfaat dan peran mereka dalam pengembangan objek wisata Goa Kreo.

DAFTAR PUSTAKA

- Berutu, F. (2023). Strategi pengembangan destinasi wisata tangga seribu delleng sindeka sebagai daya tarik wisata kabupaten pakpak Bharat Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(1), 132-140.
<https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58331>
- Brilianti, P. A. (2021). Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Perekonomian Petani Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah di Desa Bolosingo Kec. Pacitan Kab. Pacitan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Cahyadi, H. S. (2020). Dasar-dasar pembangunan destinasi pariwisata. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.18>
- Ervianti, E. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota

- Makassar (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Handayani, A., Widiastuti, W., & Hermawan, A. (2022). The Tourism Sector Actor Collaboration Role in Post-COVID-19 Economic Recovery of Central Java, Indonesia. *Journal of Resilient Economies* (ISSN: 2653-1917), 2(1).
<https://doi.org/10.25120/jre.2.1.2022.3909>
- Handayani, F., & Hardi Warsono. (2017). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(3).
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16543>
- Mistriani, N., Nasrullah, N., Lestari, N., Revida, E., Simarmata, M. M., Murdana, I. M., ... & Tristantie, N. (2021). Pengantar Pariwisata dan Perhotelan. Yayasan Kita Menulis
- Setiawan, Beny., & Herbasuki Nurcahyanto. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(2).
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27351>
- Soselissa, F., & Seipalla, B. (2021). Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Siwang Paradise Di Desa Siwang Kota Ambon. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 5(1), 28-39.
<https://doi.org/10.30598/jhppk.v5i1.4003>
- Yosevita, L. (2015). Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri X* Nomor, 1.

Peraturan Perundangan

Republik Indonesia, Peraturan Daerah 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015 – 2025.

Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Republik Indonesia, Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang.

Republik Indonesia, Surat Keputusan
Walikota Semarang Nomor
317/HK/KPTS/202 tentang
Penetapan Objek Wisata Daya Tarik
Wisata Kota Semarang.

Republik Indonesia, Undang – Undang
Kepariwisata RI No. 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisata.

Sumber lainnya

Badan Pusat Statistik. (2022). Provinsi
Jawa Tengah dalam Angka: Jawa
Tengah Province in Figures 2023.
[https://jateng.bps.go.id/publication/
2023/02/28/754e4785496c09ab1f7
875 70/provinsi-jawa-tengah-
dalam-angka-2023.html](https://jateng.bps.go.id/publication/2023/02/28/754e4785496c09ab1f787570/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2023.html)

Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
(2019). Perkembangan Statistik
Pariwisata Kota Semarang. 71, 1-9.
[https://semarangkota.bps.go.id/pres
srelease.html](https://semarangkota.bps.go.id/pres_srelease.html)

Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
(2022). Kota Semarang dalam
angka: Semarang Municipality in
Figures 2022. 302.
[https://semarangkota.bps.go.id/publ
ication/2022/02/25/b4fc35189dd9d
76b 896dcbf3/kota-semarang-
dalam-angka-2022.html](https://semarangkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/b4fc35189dd9d76b896dcbf3/kota-semarang-dalam-angka-2022.html)

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

(2019). Buku Statistik Pariwisata
Jawa Tengah dalam Angka 2020.
[https://disporapar.jatengprov.go.id/
content/files/Statistik-Pariwisat-
Jawa-Tengah-dalam-Angka-
2020.pdf](https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/Statistik-Pariwisat-Jawa-Tengah-dalam-Angka-2020.pdf)

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
(2020). Buku Statistik Pariwisata
Jawa Tengah dalam Angka 2021.
[https://disporapar.jatengprov.go.id/
content/files/1656301445BUKU-
STATISTIK---JAWA-TENGAH-
DALAM-ANGKA-2021.pdf](https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/1656301445BUKU-STATISTIK---JAWA-TENGAH-DALAM-ANGKA-2021.pdf)

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
(2021). Buku Statistik Pariwisata
Jawa Tengah dalam Angka 2022.
[https://disporapar.jatengprov.go.id/
content/files/DRAFT-
BUKU-STATISTIK-JAWA-
TENGAH-DALAM-ANGKA-
2022-1674194591.pdf](https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/DRAFT-BUKU-STATISTIK-JAWA-TENGAH-DALAM-ANGKA-2022-1674194591.pdf)